

# PENGARUH KOMUNIKASI SOSIAL DAN KEMAMPUAN PENGUASAAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KODIM 0621/KABUPATEN BOGOR

## THE EFFECT OF SOCIAL COMMUNICATION AND REGIONAL AUTHORITIES ON PERFORMANCE OF SOCIAL CONFLICT HANDLING KODIM 0621 / BOGOR REGENCY

Hendra Sukmana<sup>1</sup>, Mardi Siswoyo<sup>2</sup>, Trisna Lidia<sup>3</sup>

Program Studi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

(notuphato74@gmail.com, siswoyomardi@gmail.com, trisnalidia64@gmail.com)

**Abstrak** -- Konflik sosial yang terjadi memiliki bentuk yang menggambarkan adanya ketidakpastian pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan sosial yang berujung pada terjadinya konflik sering muncul di berbagai wilayah tidak terkecuali Kabupaten Bogor. Dapat di pahami seharusnya dengan kemampuan komunikasi sosial serta penguasaan wilayah yang di miliki serta regulasi dan peraturan yang ada dapat menjadi harapan bahwa konflik sosial dapat dicegah dengan penanganan konflik yang telah di rencanakan dan di siapkan, namun saat ini kondisi nyata di lapangan konflik sosial masih kerap saja terjadi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah serta pengaruhnya secara simultan terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 variabel independen dan satu variabel dependen. Lokus penelitian berada di Kodim 0621/Kab Bogor. Hasil penelitian yang diperoleh setelah di laksanakan uji-t adalah terdapat dampak yang signifikan dari komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Hasil koefisien Determinasi ( $R^2$ ) di mana kedua variabel secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor sebesar 46%. Dan hasil Pada Uji f yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara Komunikasi Sosial dan Kemampuan Penguasaan Wilayah secara simultan terhadap kinerja penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor.

**Kata kunci:** Komunikasi Sosial, Kemampuan Penguasaan Wilayah dan Kinerja Penanganan Konflik sosial

**Abstract** -- Social conflicts that occur have a form that describes the uncertainty in the aspects of the life of the nation and state. Various social problems that lead to conflict often arise in various regions, including Bogor Regency. It can be understood should be with the ability of social communication and

<sup>1</sup> Alumni Mahasiswa Program Studi Magister Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Dr. Mardi Siswoyo, S.Sos., M.M. adalah Lektor Ilmu Humaniora Fakultas Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Trisna Lidia, S.Sos., M.M. adalah Analis Madya Bidang Perencanaan dan Keuangan Roren dan Ku Han, Universitas Pertahanan.

control and the existing regulations and regulations can be hoped that social conflicts can be prevented by handling conflicts that have been planned and prepared, but now the real conditions in the field of social conflict still occur frequently. The purpose of this study was to analyze and examine the effect of social communication and regional mastery ability and its effect simultaneously on the performance of handling social conflicts. The research method used in this study used a quantitative research method with 2 independent variables and one dependent variable. The research focus was at Kodim 0621 / Kab Bogor. The results of the research obtained after the t-test were carried out were significant impacts of social communication and regional mastery ability on the performance of handling social conflicts. The results of the Determination coefficient ( $R^2$ ) where both variables jointly influence the Performance of Social Conflict Management Kodim 0621 / Kab. Bogor by 46%. on the performance of handling the Social Conflict of the 0621 Kodim / Bogor District Military Command.

**Keywords:** Social Communication, Regional Mastery Ability and Social Conflict Management Performance.

## Pendahuluan

Perkembangan situasi nasional saat ini masih diwarnai berbagai masalah akibat krisis berkepanjangan yang bersifat multidimensional. Situasi ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia, juga perkembangan global yang terjadi saat ini. Kondisi bangsa Indonesia menggambarkan adanya ketidak pastian pada hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan sosial yang berujung pada terjadinya konflik muncul di berbagai wilayah. Kondisi seperti ini menuntut TNI AD khususnya aparat Komando kewilayahan untuk tetap konsisten melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Komando kewilayahan sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan fungsi Binter diharapkan mampu berperan dalam

menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Memahami permasalahan yang terjadi dan tantangan tugas Komando kewilayahan kedepan yang semakin kompleks menuntut adanya aparat Komando kewilayahan yang profesional dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial, guna mendukung hal tersebut maka perlu adanya upaya peningkatan kemampuan aparat Kowil dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial. TNI AD membangun dan mengembangkan kemampuan binter dengan menggunakan metode pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, dan bakti TNI yang aktual. Dalam hal pembinaan kemampuan prajurit secara perorangan, kemampuan minimal yang harus dimiliki Apkowil adalah kemampuan temu cepat dan lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan pembinaan dan

penguasaan wilayah, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat, dan kemampuan komunikasi sosial yang kemudian dapat di jadikan sebagai tolok ukur kinerja Satuan Komando Kewilayahan. Di antara lima kemampuan ini dua kemampuan sangat mendasari dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial, yaitu kemampuan penguasaan wilayah dan kemampuan komunikasi sosial.

Seharusnya dengan kinerja Satkowil yaitu Komunikasi sosial dan Kemampuan penguasaan wilayah yang di miliki, serta regulasi dan peraturan yang ada , harapan terhadap kejadian Konflik Sosial dapat dicegah dengan penanganan konflik yang telah di siapkan, namun saat ini kondisi nyata di lapangan konflik sosial kerap saja tetap terjadi, fenomena ini menarik untuk di laksanakan penelitian karena sewajarnya penguasaan wilayah serta komunikasi sosial yang di miliki komando kewilayahan dapat mendukung pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Di butuhkan kedalaman penelitian serta kejelian terhadap kemampuan tersebut agar penelitian memiliki nilai dan makna yang berguna kepada tujuan penelitian ini di laksanakan.

Selain hal tersebut di atas pengaruh komunikasi sosial serta kemampuan

penguasaan wilayah terhadap kinerja penanganan Konflik Sosial memiliki gambaran dimana terjadinya kerjasama antara stakeholder yang terkait. Ini menggambarkan betapa penanganan konflik sosial membutuhkan konsep terpadu dan inovasi serta kreatifitas para bagian yang terpadu tersebut. Sehingga Konflik sosial dapat di hindarkan dengan tuntas tanpa menyisakan konflik - konflik yang lain.

## **Landasan Teori**

### **Komunikasi Sosial**

Seluruh dimensi kehidupan manusia dipenuhi dengan komunikasi. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa berkomunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kepentingan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Melalui komunikasi sosial kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan meningkatkan kesehatan mental, kita belajar tentang makna cinta, kasih sayang, simpati, rasa hormat, rasa bangga, irihati, bahkan kebencian. Para pakar atau ahli pun mencoba untuk merumuskan definisi Komunikasi Sosial dari berbagai sudut pandang pemikiran. Onong Uchjana Effendy seorang pakar komunikasi dalam

tulisannya menyatakan bahwa terdapat dua dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi, yaitu Komunikasi Internal dimana Organisasi sebagai kerangka (*framework*) menunjukan adanya pembagian tugas antara orang – orang di dalam organisasi itu dan dapat di klasifikasikan sebagai tenaga pimpinan dan tenaga yang di pimpin; dan Komunikasi Eksternal, merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak diluar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri atas dua jalur secara timbal balik yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi<sup>4</sup>.

Sedangkan TNI AD memaknai Komunikasi Sosial itu sendiri yang tertulis dalam Bujuknik Komsos TNI AD Nomor Skep/480/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Komsos *...mekanisme penyelenggaraan Komsos terbagi dua, yakni penyelenggaraan “Komunikasi Sosial Rutin” untuk pembinaan dan “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial insidentil” untuk mencegah/ meminimalisasi suatu kondisi. Dimana Tujuan Penyelenggaraan Komsos Rutin adalah meningkatkan*

*kesadaran masyarakat tentang pemahaman Bela Negara, serta mencegah timbulnya pengaruh negatif yang dapat melunturkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Kegiatan ini memiliki sasaran terciptanya wilayah yang kondusif tanpa terpengaruh oleh perbedaan SARA, terwujudnya pemahaman bagi seluruh komponen bangsa bahwa Bela Negara merupakan kewajiban setiap warga Negara, terciptanya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan didaerah,serta terciptanya kemanunggalan antara TNI dengan seluruh komponen masyarakat...*

Sesuai dengan teori tersebut di atas dapat sangatlah penting untuk kita pahami dan mengenali tentang arti Komunikasi Sosial. Sehingga dapat di konsepskan sebagai sintesis definisi Komunikasi Sosial adalah proses komunikasi secara internal maupun eksternal yang di lakukan oleh prajurit dan satuan jajaran TNI AD guna menyampaikan pikiran dan pandangannya Kepada Aparat Pemerintah, Komponen Masyarakat, dan Keluarga Besar TNI melalui penyelenggaraan Komsos rutin sebagai pembinaan dan Komsos insidentil sebagai pencegahan kondisi sosial masyarakat

---

<sup>4</sup> Onong Uchjana Effendy.2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya.

dalam rangka mewujudkan rasa saling pengertian dan kebersamaan untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara komponen bangsa dengan aparat di wilayah, termasuk memperkuat jalinan komunikasi dan koordinasi antara satuan TNI AD dengan instansi-instansi terkait di wilayah dengan sasaran terciptanya wilayah yang kondusif tanpa terpengaruh oleh perbedaan SARA, terwujudnya pemahaman bahwa Bela Negara merupakan kewajiban bagi seluruh komponen bangsa, terciptanya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan di daerah, serta terciptanya kemanunggalan antara TNI dengan seluruh komponen masyarakat.

### **Kemampuan Penguasaan Wilayah**

Kemampuan atau *abilities* ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman selama masa hidupnya<sup>5</sup>. Ini menggambarkan Kemampuan, dapat diartikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, kelompok maupun organisasi.

Robert R. Menyampaikan bahwa ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu Kemampuan Teknis (*Technical Skill*), yaitu pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja kemudian Kemampuan bersifat manusiawi (*Human Skill*) merupakan kemampuan untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah dan yang terakhir adalah Kemampuan Konseptual (*Conceptual Skill*) adalah kemampuan seorang *decision maker* dalam menganalisis dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya<sup>6</sup>.

Di hadapan dengan beberapa definisi Kemampuan penguasaan wilayah berdasarkan pemahaman teori dan para ahli sangat berbeda dengan konsep Kemampuan Penguasaan Wilayah yang dimiliki oleh TNI dalam hal pembinaan teritorial dimana diantaranya menurut salah satu ahli yaitu Hsin Wu menjelaskan Penguasaan atas wilayah dapat dilakukan

---

<sup>5</sup> Soehardi, 2003. *Esensi Perilaku Organisasi*. Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

dengan 5 cara yaitu, okupasi, preskripsi, cession, penambahan wilayah (*accretion*), dan penaklukan (*conquest by use of force*)<sup>7</sup>.

Sementara dalam pembinaan teritorial TNI penguasaan wilayah yang di kaitkan dengan kemampuan TNI merupakan ...Kemampuan TNI untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi SDA, SDB dan SDM serta sarana dan prasarana suatu daerah, sehingga dapat mengantisipasi hakekat ancaman yang mungkin timbul dan perkembangannya, serta mampu merumuskan dan mengambil langkah/tindakan untuk pencegahan dan penangkalannya dalam rangka menciptakan Ketahanan Wilayah...<sup>8</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang kemampuan penguasaan wilayah di atas dapat di konsepskan definisi kemampuan penguasaan wilayah yaitu kemampuan teknis, kemampuan bersifat manusiawi dan kemampuan konseptual untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi SDA, SDB dan SDM serta sarana dan prasarana suatu daerah, dalam merumuskan dan mengambil langkah serta tindakan untuk pencegahan dan penangkalan dalam mengantisipasi konflik

sosial yang mungkin timbul serta perkembangannya dalam rangka menciptakan Ketahanan Wilayah.

### **Kinerja Penanganan Konflik Sosial**

Berbagai upaya penanganan konflik terus dilakukan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Penanganan Konflik Sosial bertitik berat pada apa yang harus dilakukan, sementara bila kita bicara Kinerja, maka akan tercetus sebuah pemikiran sejauh mana tingkatannya, berhasil atau tidak dan se efektif apa pelaksanaannya. Sebuah teori Samsudin menyebutkan bahwa Kinerja merupakan tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan"<sup>9</sup>. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mahsun dimana Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang

---

<sup>7</sup> Hsin Wu, *A criticism of Bourgeois International Law on the Question of State Territory*, Princeton University Press.

<sup>8</sup> Pusdikter. 2003. *Bujuknik Lima Kemampuan Ter. PT : Ter-04*. Jakarta.

<sup>9</sup> Sadili, Samsudin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.

tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi<sup>10</sup>.

Dan bila kita lihat dengan regulasi yang mengacu pada strategi penanganan Konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, yaitu regulasi UU No 7 Tahun 2012 dimana kerangka regulasi penanganan konflik sosial mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/ proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Maka dari beberapa pemikiran para ahli tentang kinerja dan penanganan konflik sosial tersebut di atas dapat di definisikan tentang Kinerja Penanganan Konflik Sosial adalah merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seseorang, unit atau divisi dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi dalam suatu perencanaan, persiapan dan pengakhiran pada penanganan konflik sosial yang meliputi tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan yang telah ditetapkan di dasari oleh pengetahuan, sikap keterampilan dan motivasi.

Dan Penelitian ini menitik beratkan pada Kodim 0621/Kab Bogor dimana Wilayah Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota DKI Jakarta, Permasalahan dan konflik sosial sering muncul sebagai permasalahan di lapangan. Tugas pemerintah dan TNI khususnya Satuan Komando Kewilayahan di Kabupaten Bogor dimana harus menjaga agar kedaulatan dan keutuhan bangsa serta tetap aman dari berbagai ancaman, maka Satuan Komando Kewilayahan berusaha untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial dengan kinerja aparat dan satuan yang optimal. oleh karena itu, Satuan Komando Kewilayahan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah yang baik.

---

<sup>10</sup> Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Dari beberapa teori dan regulasi tersebut di atas maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, Komunikasi Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Penanganan Konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor; Kedua, Kemampuan Penguasaan Wilayah berpengaruh terhadap Kinerja penanganan Konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor; dan ketiga, Komunikasi Sosial dan Kemampuan Penguasaan Wilayah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja penanganan Konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangka dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah personel Kodim 0621/Kabupaten Bogor Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-

data mengenai personel di Kodim 0621/Kabupaten Bogor, catatan, arsip, brosur dan lain sebagainya yang berguna sebagai pelengkap. Populasi dalam penelitian ini adalah personel Satuan Komando Kewilayahan di Kabupaten Bogor di Kodim 0621/Kabupaten Bogor (Nyata) sebanyak 636 Personel di kurangi LF sebanyak 65 orang sejumlah 571 yang terdiri dari Perwira sebanyak 36 orang, Bintara sebanyak 495 orang dan Tamtama sebanyak 40 orang . Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Sampling Random* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dari data ini didapat jumlah responden untuk perwira sejumlah 27 orang, Bintara sejumlah 84 orang, dan Tamtama sebanyak 28 orang, total responden sebanyak 139 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Observasi (Pengamatan) di mana Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh komunikasi sosial dan kemampuan



penguasaan wilayah terhadap kinerja penanganan konflik sosial, Kemudian

Teknik Angket / Kuesioner di mana Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki dan pengukurannya menggunakan skala *likert* yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, Dan selanjutnya Teknik Dokumentasi, dimana Dokumen yang ditunjukkan adalah segala dokumen yang berhubungan dengan kelembagaan, struktur organisasi serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam hal ini Kodim 0621/Kabupaten Bogor dan kaitannya dengan kegiatan komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah terhadap Kinerja penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bogor.

Data yang di peroleh di lakukan Pengujian Kualitas data melalui Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji asumsi klasik melalui Uji Normalitas, Linieritas, dan Multikolienaritas, kemudian di lakukan Analisis deskriptif Presentase dan Analisis regresi Linear Berganda, Selanjutnya di lakukan Uji Hipotesis menggunakan Uji

Partial (Uji t) , Uji Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

## **Pembahasan**

### **Deskripsi Kodim 0621/Kab Bogor**

Kodim 0621 / Kab Bogor merupakan salah satu satuan di bawah Korem 061/Surya Kancana Kodam III / Siliwangi. Kodim ini berkedudukan di Jl.Tegar Beriman Kel Tengah Kec Cibinong Kabupaten Bogor.Kodim 0621/Kab Bogor adalah Satuan Komando Kewilayahan yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pembinaan kemampun,keluatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem.Pelaksanaan penelitian terdiri dari berbagai tahapan, pertama meminta surat izin penelitian, dilanjutkan dengan membuat kuesioner penelitian, selanjutnya melakukan uji coba kuesioner penelitian, menyebar kuesioner penelitian, dan menyusun laporan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, yang mana kuesioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang dikembangkan dari indikator-indikator variabel. Setelah paham kemudian dimulai dengan

menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden penelitian. Untuk menganalisa dan membahas Fenomena Komunikasi Sosial dan Kemampuan Penguasaan Wilayah Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor peneliti akan membahasnya melalui pembahasan sebagai berikut :

### **Pengaruh Komunikasi Sosial Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor**

Berdasarkan Deskripsi data tentang Pengaruh Komunikasi Sosial didapatkan hasil dimana Tingkatan Komunikasi Sosial termasuk ke dalam kriteria penilaian **“TINGGI”**, artinya bahwa Komunikasi Sosial Kodim 0621/Kab Bogor saat ini berada pada kategori **“TINGGI”** sebagai akibat dari pengaruh Komunikasi sosial yang bijak dan tepat oleh aparat komando kewilayahan Kodim 0621/Kab Bogor, dimana nilai responden tertinggi terhadap komunikasi sosial berada pada pernyataan **“Kegiatan Komunikasi Sosial dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan Kodim 0621/Kab Bogor dalam memahami permasalahan sosial”** merupakan hal yang menjadi penilaian terbaik dengan skor 574 sedangkan nilai responden terendah berada pada pernyataan **“Keterlibatan Kodim 0621/**

Kabupaten Bogor dalam kegiatan penanganan konflik sosial merupakan bentuk bantuan TNI kepada Polri dapat mengurangi timbulnya gesekan antar kelompok/warga” sebesar 438.

Di dalam hasil perhitungan data, diperoleh nilai koefisien korelasi ( $\beta_{yx1}$ ) antara komunikasi sosial dengan kinerja penanganan konflik sosial sebesar 0,214 ( $\beta_{yx1} = 0,214$ ). Karena  $\beta_{yx1} \neq 0$ , berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana variabel komunikasi sosial ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap variabel kinerja penanganan konflik sosial ( $Y$ ). Hubungan yang terjadi bertanda positif (searah), yang berarti bahwa komunikasi sosial yang baik, maka kinerja penanganan konflik sosial akan baik juga. Dan sebaliknya apabila komunikasi sosial tidak baik, maka akan menyebabkan menurunnya kinerja penanganan konflik sosial. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi nilai  $\beta_{yx1}$ , hasil perhitungan diatas masuk dalam kategori **“Rendah”** (interval 0,21 – 0,40). Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi sosial memberikan pengaruh yang rendah terhadap variabel kinerja penanganan konflik sosial. Artinya, komunikasi sosial di Kodim 0621/Kab Bogor saat ini memberikan pengaruh positif dengan kategori rendah terhadap

kinerja penanganan konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor.

Variabel Komunikasi Sosial memiliki koefisien regresi sebesar 0,016. Variabel *Komunikasi Sosial* cenderung mempunyai pengaruh searah terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Hal ini berarti bahwa bila penggunaan komunikasi sosial negatif maka akan menyebabkan menurunnya kinerja penanganan konflik sosial disatuan.

Nilai Koefisien determinasi adalah sebesar 4,58% yang berarti bahwa variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) memberikan kontribusi pengaruh kepada variabel Kinerja penanganan konflik sosial ( $Y$ ) sebesar 4,58%, sedangkan sisanya sebesar 95,42% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,331 > 1,997$  dan nilai signifikansi (Sig)  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti “Komunikasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja penanganan konflik sosial”.

Hasil penelitian yang diperoleh mendukung hipotesis pertama yaitu komunikasi Sosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Responden menilai terdapat pengaruh Komunikasi Sosial terhadap

kinerja penanganan konflik sosial yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil Aparat komando kewilayahan (Apkowil) di satuan yang menggunakan kemampuan komunikasi sosialnya secara tidak tepat bahkan berlebihan sehingga menyebabkan menurunnya kinerja penanganan konflik sosial.

Hasil penelitian terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) dimana pernyataan pada variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) memuat tentang taktik dan teknik dalam melaksanakan Komunikasi Sosial yang semestinya dilakukan oleh Apkowil, apabila apkowil tidak melaksanakan kemampuan penguasaan wilayahnya secara maksimal, akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dan pengaruh negatif terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Berdasarkan hasil responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada, terdapat data penelitian yang menunjukkan persentase yang menyatakan “Sangat setuju” dan “Setuju” dengan pernyataan yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa terdapat Apkowil yang menggunakan Komunikasi Sosial secara berlebihan dan tidak tepat sehingga berpengaruh

terhadap kinerja penanganan konflik sosial di satuan.

Dari hasil analisa statistik, juga diperoleh hasil yang mendukung hipotesis pertama bahwa Komunikasi Sosial berpengaruh positif terhadap kinerja penanganan konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi Komunikasi Sosial sebesar 0,016 sehingga persamaan garis regresinya adalah  $Y = 37,042 + 0,016 X_1$ , yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan Komunikasi Sosial maka akan menaikkan kinerja penanganan konflik sosial sebesar 0,016  $X_1$  dan sebaliknya bila Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) turun 1 satuan maka kinerja penanganan konflik sosialpun akan turun sebesar 0,016  $X_1$ . Selain itu, juga dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $\beta_{yx1}$ ) sebesar 0,214 yang bernilai positif antara Komunikasi Sosial dan kinerja penanganan konflik sosial. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  yaitu  $6,331 > 1,997$  dan mengidentifikasi bahwa variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penanganan konflik sosial (Y). Sedangkan Nilai sig pada tabel sebesar 0 (di bawah 0,05) juga mengidentifikasi bahwa variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif terhadap variabel kinerja penanganan konflik sosial (Y). Dari hasil

analisis diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,0458 yang berarti bahwa variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) memberikan kontribusi pengaruh kepada variabel Kinerja penanganan konflik sosial (Y) sebesar 4,58%, sedangkan sisanya sebesar 95,42% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

#### **Pengaruh Kemampuan Penguasaan Wilayah Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor.**

Deskripsi data Kemampuan Penguasaan Wilayah termasuk ke dalam kriteria penilaian “TINGGI”, artinya bahwa Kemampuan Penguasaan Wilayah Kodim 0621/Kab Bogor saat ini berada pada kategori “TINGGI” sebagai akibat dari pengaruh Kemampuan Penguasaan Wilayah yang bijak dan tepat oleh aparat komando kewilayahan Kodim 0621/Kab Bogor, dimana nilai responden tertinggi terhadap kemampuan penguasaan wilayah berada pada pernyataan “Dalam memelihara kemampuan penguasaan wilayah yang merupakan kemampuan teritorial membutuhkan jadwal kegiatan sebagai pedoman” merupakan hal yang menjadi penilaian terbaik dengan skor 611 sedangkan nilai responden terendah berada pada pernyataan “Mengevaluasi

seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuat laporan ke Komando Atas merupakan wujud pertanggung jawaban kodim 0621/Kab Bogor” sebesar 542.

Didalam hasil perhitungan data, diperoleh nilai koefisien korelasi ( $\beta_{yx2}$ ) antara kemampuan penguasaan wilayah dengan kinerja penanganan konflik sosial sebesar 0,213 ( $\beta_{yx2} = 0,213$ ). Karena  $\beta_{yx1} \neq 0$ , berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana variabel Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap variabel kinerja penanganan konflik sosial (Y). Hubungan yang terjadi bertanda positif (searah), Hubungan yang terjadi bertanda positif (searah), yang berarti apabila kemampuan penguasaan wilayah baik, maka kinerja penanganan konflik sosial akan baik juga. Dan sebaliknya apabila kemampuan penguasaan wilayah tidak baik dan bijak maka akan menyebabkan menurunnya kinerja penanganan konflik sosial. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi nilai r, hasil perhitungan diatas masuk dalam kategori **“Rendah”** (interval 0,21 – 0,40). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemampuan penguasaan wilayah memberikan pengaruh yang rendah terhadap variabel kinerja penanganan konflik sosial. Artinya, kemampuan penguasaan wilayah saat ini memberikan

pengaruh positif dengan kategori rendah terhadap kemampuan penguasaan wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

Variabel kemampuan penguasaan wilayah memiliki koefisien regresi sebesar 0,213. Variabel *kemampuan penguasaan wilayah* cenderung mempunyai pengaruh searah terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Hal ini berarti bahwa bila Penggunaan Kemampuan penguasaan wilayah negatif maka akan menyebabkan menurunnya kinerja penanganan konflik sosial. Nilai Koefisien determinasi adalah sebesar 4,53 % yang berarti bahwa variabel Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) memberikan kontribusi pengaruh kepada variabel kinerja penanganan konflik sosial (Y) sebesar 4,53 %, sedangkan sisanya sebesar 95,47 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $8,328 > 1,997$  dan nilai signifikansi (Sig)  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti “Kemampuan penguasaan wilayah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penanganan konflik sosial”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian mendukung hipotesis kedua yaitu Kemampuan Penguasaan Wilayah memiliki pengaruh positif

terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian Apkowil di satuan yang belum menggunakan kemampuan penguasaan wilayah secara tepat sehingga menyebabkan munculnya rasa malas, sikap acuh, apatis dalam pedoman pelaksanaan kegiatan, inventarisir data teritorial dan klasifikasi wilayah konflik yang tidak valid, tidak bisa berkoordinasi dengan satuan dan stake holder terkait dan hal ini diyakini sebagai penyebab menurunnya kinerja penanganan konflik sosial.

Dari deskripsi hasil penelitian terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) dimana pernyataan pada variabel Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) memuat tentang manfaat maupun kegunaan Kemampuan penguasaan wilayah yang membuat Apkowil menggunakan kemampuan tersebut. Manfaat kemampuan ini apabila salah, akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dan pengaruh negatif terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Berdasarkan hasil responden terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner, terdapat data penelitian yang menunjukkan persentase yang menyatakan

“Sangat setuju” “Setuju” dengan pernyataan yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebagian Apkowil yang menggunakan Kemampuan penguasaan wilayah secara berlebihan dan tidak tepat sehingga berpengaruh terhadap kinerja penanganan konflik sosial.

Dari hasil analisa statistik, juga diperoleh hasil yang mendukung hipotesis kedua bahwa kemampuan penguasaan wilayah berpengaruh terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi kemampuan penguasaan wilayah sebesar 0,392 menyatakan bahwa setiap kenaikan kemampuan penguasaan wilayah maka akan menaikkan kinerja penanganan konflik sosial sebesar 0,392. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) yang bernilai positif antara Komunikasi Sosial dan kinerja penanganan konflik sosial sebesar 8,328. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  yaitu 8,328 > 1,997 mengidentifikasikan bahwa variabel kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penanganan konflik sosial ( $Y$ ). Nilai sig pada tabel sebesar 0 (di bawah 0,05) juga mengidentifikasikan bahwa variabel kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) memiliki pengaruh negatif terhadap

variabel kinerja penanganan konflik sosial (Y). Dari hasil analisis juga diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,045369 yang berarti bahwa variabel kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) memberikan kontribusi pengaruh kepada variabel kinerja penanganan konflik sosial (Y) sebesar 4,53%, sedangkan sisanya sebesar 95,47% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) dan Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja penanganan konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor**

Pada Deskripsi data tentang Kinerja penanganan konflik sosial di dapatkan hasil dimana Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor termasuk ke dalam kriteria penilaian **“SANGAT TINGGI”**, artinya bahwa Kinerja penanganan konflik sosial saat ini berada pada kategori **“SANGAT TINGGI”** sebagai akibat dari pengaruh penanganan konflik sosial yang bijak dan tepat oleh aparat komando kewilayahan Kodim 0621/Kab Bogor, dimana nilai responden tertinggi terhadap kinerja penanganan konflik sosial berada pada pernyataan “Visi dalam penanganan Konflik Sosial adalah terciptanya koordinasi serta hubungan

yang sinergis antara tim secara terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial serta tersusunnya kebijakan sebagai bahan acuan dalam penanganan konflik sosial” merupakan hal yang menjadi penilaian terbaik dengan skor 629 sedangkan nilai responden terendah berada pada pernyataan “Kolaborasi merupakan strategi *win-win solution* dalam penanganan konflik sosial guna mencapai suatu tujuan perdamaian khususnya bila menghadapi konflik tingkat tinggi” sebesar 555.

Untuk menguji ada tidaknya komunikasi sosial ( $X_1$ ) dan kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja penanganan konflik Sosial (Y) maka dilaksanakan pengujian hipotesis. Adapun hipotesis yang diuji dengan uji F. Berdasarkan hasil data, di peroleh  $F_{hitung}$  sebesar 3,252. Jumlah variabel bebas adalah  $k=2$ , rumus mencari  $F_{tabel}$  adalah  $(k;n-k)=(2;137)$ , pada data  $F_{tabel}$  statistik data tersebut adalah 3,09, karena data  $F_{hitung}$  3,252 lebih besar di banding nilai  $F_{tabel}$ , 3,09 maka dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel  $X_1$  (Komunikasi Sosial) dan  $X_2$  (Kemampuan Penguasaan Wilayah) secara simultan berpengaruh terhadap Variabel Y (Kinerja Penanganan Konflik Sosial).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga yaitu Komunikasi Sosial Dan Kemampuan Penguasaan Wilayah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial. Sesuai dengan Deskripsi hasil penelitian terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) dan Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) terhadap kinerja penanganan konflik sosial (Y) dimana terdapat data penelitian yang menunjukkan persentase yang menyatakan **“Sangat Setuju”** dan **“Setuju”** dengan pernyataan yang diberikan. Hal ini memungkinkan bahwa responden menilai terdapat pengaruh antara komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah secara simultan terhadap kinerja penanganan konflik sosial.

Dari Deskripsi hasil penelitian terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) dan Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) terhadap kinerja penanganan konflik sosial (Y). Penerapan komunikasi sosial juga berpengaruh pada pelaksanaan kemampuan penguasaan wilayah. Berdasarkan hasil responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kinerja penanganan konflik sosial,

terdapat data penelitian yang menunjukkan persentase yang menyatakan **“Sangat setuju”** dan **“Setuju”** dengan pernyataan yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebagian Apkowil yang mulai menurun komunikasi sosialnya sehingga berpengaruh negatif terhadap kemampuan penguasaan wilayah. Sedangkan dari hasil analisa statistik, juga diperoleh hasil yang mendukung hipotesis ketiga bahwa Komunikasi Sosial Dan Kemampuan Penguasaan Wilayah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai yang di peroleh dari uji F dimana  $F_{hitung}$  sebesar 3,252.  $F_{tabel}$  statistik data tersebut adalah 3,09, karena data  $F_{hitung}$  3,252 lebih besar di banding nilai  $F_{tabel}$ , maka dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel  $X_1$  (Komunikasi Sosial) dan  $X_2$  (Kemampuan Penguasaan Wilayah) secara simultan berpengaruh terhadap Variabel Y (Kinerja Penanganan Konflik Sosial).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga yaitu Komunikasi Sosial Dan Kemampuan Penguasaan Wilayah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial. Sesuai dengan Deskripsi hasil penelitian terhadap pernyataan-



pernyataan pada variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) dan Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) terhadap kinerja penanganan konflik sosial (Y) dimana terdapat data penelitian yang menunjukkan persentase yang menyatakan **“Sangat Setuju”** dan **“Setuju”** dengan pernyataan yang diberikan. Hal ini memungkinkan bahwa responden menilai terdapat pengaruh antara komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah secara simultan terhadap kinerja penanganan konflik sosial.

Dari Deskripsi hasil penelitian terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Komunikasi Sosial ( $X_1$ ) dan Kemampuan penguasaan wilayah ( $X_2$ ) terhadap kinerja penanganan konflik sosial (Y). Penerapan komunikasi sosial juga berpengaruh pada pelaksanaan kemampuan penguasaan wilayah. Berdasarkan hasil responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kinerja penanganan konflik sosial, terdapat data penelitian yang menunjukkan persentase yang menyatakan **“Sangat setuju”** dan **“Setuju”** dengan pernyataan yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebagian Apkowil yang mulai menurun komunikasi sosialnya sehingga berpengaruh negatif terhadap kemampuan penguasaan wilayah.

Sedangkan dari hasil analisa statistik, juga diperoleh hasil yang mendukung hipotesis ketiga bahwa Komunikasi Sosial Dan Kemampuan Penguasaan Wilayah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai yang di peroleh dari uji F dimana  $F_{hitung}$  sebesar 3,252.  $F_{tabel}$  statistik data tersebut adalah 3,09, karena data  $F_{hitung}$  3,252 lebih besar di banding nilai  $F_{tabel}$ , maka dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel  $X_1$ (Komunikasi Sosial) dan  $X_2$ (Kemampuan Penguasaan Wilayah) secara simultan berpengaruh terhadap Variabel Y(Kinerja Penanganan Konflik Sosial).

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama; Komunikasi sosial berpengaruh positif terhadap kinerja penanganan konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya para unsur Pimpinan Kodim 0621/Kab Bogor lebih memperhatikan dan memperbaiki kemampuan komunikasi sosial Aparat komando kewilayahan di satuannya secara tepat dan bijak. Kedua; Kemampuan penguasaan wilayah berpengaruh positif terhadap kinerja penanganan konflik sosial Kodim

0621/Kab Bogor. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pimpinan dan satuan lebih menekankan tentang kemampuan penguasaan wilayahnya sehingga akan mendukung terwujudnya tugas pokok satuan. Selama ini kemampuan penguasaan wilayah Kodim 0621/Kab Bogor telah di upayakan secara baik, namun penguasaan wilayah harus di laksanakan secara tepat dan bijak sehingga dapat membuat Apkowil untuk memiliki motivasi untuk menjalankan pedoman terhadap penguasaan wilayahnya, timbul semangat, profesionalisme di bidang sosial kemasyarakatan, perduli dan mawas diri dengan wilayah binaannya masing-masing sehingga menyebabkan meningkatnya kemampuan penguasaan wilayah, etos kerja dan merasa sejiwa dengan masyarakatnya dan Ketiga Komunikasi Sosial dan Kemampuan Penguasaan Wilayah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja penanganan konflik sosial Kodim 0621/Kab Bogor; Dan Ketiga Komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial. Dapat di analogikan bahwa komunikasi sosial dapat menjadi faktor dalam kemampuan penguasaan wilayah, dan kemampuan

penguasaan wilayah dapat berpengaruh terhadap komunikasi sosial. Hal ini mengandung implikasi bahwa komunikasi sosial sebanding dengan kemampuan penguasaan wilayah yang saling berpengaruh dan kedua variabel ini juga menentukan dalam mewujudkan kinerja penanganan konflik sosial yang optimal guna mendukung pencapaian tugas pokok.

### **Saran**

Dari beberapa hasil penelitian tersebut diatas peneliti membuat saran sebagai berikut:

- a. Perlu dibuat regulasi dan peraturan terhadap komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah dengan memasukan strategi komunikasi dan penguasaan wilayah yang sesuai dengan budaya serta kearifan lokal.
- b. Membentuk sistem baku data bersama terhadap wilayah peta rawan konflik dengan update data secara terus menerus serta pemeliharaan peta sehingga data peta rawan konflik dapat selalu termonitor.
- c. Bersama dengan Unsur Pimpinan wilayah selalu berkoordinasi dengan unsur pimpinan POLRI, dan unsur

- lainnya sehingga dapat dengan cepat mengatasi kemungkinan konflik.
- d. Membuat protap satuan tentang manajemen teritorial terutama dengan metode komunikasi sosial yang sesuai.
  - e. Pembuatan buku saku praktis tentang komunikasi sosial. Diharapkan buku ini akan menjadi panduan singkat tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan Apkowil, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi sosial serta kemampuan penguasaan wilayah.
  - f. Bagi Peneliti Selanjutnya. Bahwa Variabel yang digunakan untuk penelitian ini hanya tiga variabel, pernyataan yang terbatas dan responden yang terbatas oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya agar dapat di tambahkan hal tersebut. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas yang akan mendekati gambaran hasil yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

#### Daftar Pustaka

- Astrid. S. Susanto.1997. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bina Cipta. Jakarta.
- Budyatna, Muhammad. 2011. *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Cangara, Hafied, 2002, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 361.
- Everett M. Rogers. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Hsin Wu, *A criticism of Bourgeois International Law on the Question of State Territory*, Princeton University Press,
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, ( Malang : Taroda, 2002), hal. 67.
- Myers, David G. (2005). *Social Psychology*. (5thed). USA: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 2007).
- Oppenheim, L, 1955, *International Law Volume I, Peace*, London: Longmans, Green and Co.
- Pusdikter 2013, *Komunikasi Sosial*, Lampiran III Keputusan Danpusdikter, Nomor Kep/134 / VI/2013, Bandung, 2013.
- Robbins, Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa: Benyamin Molan. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Ruben, Brent D., Stewart, Lea P. 2013. *Komunikasi Dan Perilaku Manusia* (EdisiKelima).Jakarta :Rajawali Pers.
- Shen, S. Y, dan Shaw, M. J., 2004, *Managing Coordination in Emergency Response Information Technologies*. Tenth American Conference on Information Systems, New York.
- Stuart and sundeen, 2002. *Buku saku keperawatan jiwa* (terjemahan). Edisi 9 EGC. Jakarta.

Soehardi, 2003. *Esensi Perilaku Organisasional*. Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta:Rajawali Press.

Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta

### **Jurnal**

Edwardin, Laras Tris Ambar Suksesi. 2006. Analisis Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Kecerdasan Emosional, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Se-Kota Semarang), Tesis, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

E. Dwiguspana, A.D Sumari, M Prihantoro, 2014. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kedisiplinan dan Kinerja prajurit Batalyon

kavaleri 11/serbu Kodam Iskandar muda, Universitas Pertahanan.

### **UU dan PP**

UU No 3 Th 2002 Tentang Pertahanan Negara

UU No 34 Th 2004 Tentang TNI

UU No 7 Th 2012 Tentang Konflik Sosial

PP no 2 Th 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial

### **Website**

Situs Resmi International Court of Justice,  
<http://www.icjci.org/docket/index.php?p1=3&p2=2>

<http://www.google.co.id/search?q=konflik+sosial+bogor> (di akses pada 12/04/2018)

<http://www.ilmudasar.com/2016/12/Pengertian-Penyebab-Bentuk-Dampak-Konflik-Sosial-adalah.html>.

<http://www.pemerintah.net/pp-no-2-tahun-2015-tentang-penanganan-konflik-sosial/>